

Dinamika Pelembagaan Partai Islam di Pemilu 2024; Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan

Ramdhan Muhaimin

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta

Email: ramdhan.muhaimin@uai.ac.id

Syafiuddin Fadlillah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta

Email: daffifahda@uai.ac.id

Rahman Asri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-azhar Indonesia, Jakarta

Email: rahman.asri@uai.ac.id

Abstrak

Salah satu hal paling mengejutkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) karena gagal tembus ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*). Sebagai partai Islam, kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi musibah bagi politik Islam Indonesia keseluruhan, meskipun dua partai Islam lainnya tetap bertahan ke parlemen, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kedua partai bukan sama mampu bertahan, tapi juga mendapatkan bonus elektoral. Mengapa PPP yang berdiri sejak 1973 pada akhirnya harus gagal dalam kontestasi pemilu 2024? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pelembagaan dalam kegagalan PPP dan keberhasilan PKB serta PKS dalam Pemilu 2024. Untuk menganalisis jawaban atas rumusan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan teori institusionalisme. Relevansi teori tersebut terletak pada problem PPP dalam mengartikulasikan fungsi-fungsi dan kelembagaan partai di dalam kontestasi demokrasi Indonesia yang dinamis. Sementara PKB dan PKS dinilai mampu mengoptimalkan fungsi-fungsi partai politik yang menunjukkan kematangan kedua partai tersebut dibandingkan PPP.

Kata kunci: Demokrasi, Institusionalisme, Pemilu, Politik Islam, Partai Islam

Abstract

The most surprising phenomenon in the 2024 General Election is the failure of the United Development Party (PPP) to the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) as it failed to break the parliamentary threshold. As the Islamic party, the PPP's failure in this election is certainly a disaster for Indonesian Islamic politics. However, two other Islamic parties still survive and qualify for parliament: the National Awakening Party (PKB) and the

Prosperous Justice Party (PKS). Both parties are not only able to survive but also get electoral bonuses. Why should the party founded in 1973, ultimately fail in the 2024 elections? This study analyzes the institutionalization factors in the PPP's failure and the PKB and PKS's success in the 2024 Election. This study analyzes the institutionalism factor that led to the PPP's failure in the 2024 elections. This study uses the theory of institutionalization to explore the answers to the research formulation. The relevancy of the theory lies in the problem of the PPP in articulating the party's functions and institutions well in the ever-changing contestation of Indonesian democracy. Meanwhile, PKB and PKS are considered to be able to optimize the functions of political parties which shows the maturity of both compared to PPP.

Keywords: Democracy, General Election, Islamic Party, Institutionalism, Political Islam

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum 2024 telah berhasil diselenggarakan dengan baik dan lancar. Sebanyak 204.807.222 pemilih telah memberikan suaranya di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 38 Provinsi, 514 Kota/Kabupaten, 7.277 kecamatan, dan 83.731 desa/kelurahan serta 128 perwakilan luar negeri (Topan Yuniarto, 2024; Widhia Arum Wibawana, 2024). Mereka tidak saja memilih tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi juga memilih lebih dari 250 ribu calon legislatif yang memperebutkan 20.614 kursi dewan perwakilan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Salah satu hal menarik adalah lebih dari 52 % atau sekitar 106 juta pemilih merupakan generasi Z berusia 17-40 tahun (Sijaya, 2021; Topan Yuniarto, 2024). Hasil pemilu, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029.

Selain Pemilu, rangkaian demokrasi lima tahunan 2024 juga dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dihelat pada November. Sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota menggelar secara bersamaan pemilihan kepala daerah (Sijaya, 2021; A Efendi, 2023). Keseluruhan proses demokrasi tersebut diselenggarakan dalam keberagaman sosial budaya Indonesia yang kompleks. Artinya, proses politik demokrasi berjenjang yang rumit ditambah faktor heterogenitas sosial budaya yang tinggi menyebabkan tingkat kompetisi politik cukup ketat. Salah satu fenomena menarik dalam dinamika politik di Indonesia adalah diaspora partai Islam dalam pilihan politik yang berbeda dan berseberangan, meskipun masing-masing mendasarkan ijthad politiknya pada rasionalisasi politik untuk umat dan dakwah melalui mekanisme musyawarah yang

disebut Dewan Syuro atau Majelis Syuro. Bahkan pada beberapa momentum, petunjuk ataupun restu dari tokoh spiritual tertinggi dari partai tersebut menjadi dasar pilihan politik.

Pada Pemilu 2024, ada lima partai Islam yang mengikuti kontestasi, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Ummat. Pemilu ini memberikan hasil mengejutkan, yakni kegagalan PPP mempertahankan eksistensi di DPR RI karena tidak berhasil menembus ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) 4%. Sementara PKS dan PKB tidak saja tetap bertahan, tapi juga berhasil mendapatkan bonus elektoral dan perolehan kursi di DPR RI. PKB meraih 10,62 % (68 kursi) dan PKS 8,42 % (53 kursi). Adapun PBB dan Partai Ummat menjadi partai baru yang meraih elektoral jauh di bawah PT.

Menyikapi hasil pemilu, PPP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun akhirnya MK menolak keseluruhan permohonan PPP dalam sengketa pemilihan legislatif (Pileg) DPR RI di 19 provinsi dalam Pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi menilai mayoritas permohonan sengketa yang diajukan PPP tidak memenuhi syarat formil karena dianggap kabur dan tidak jelas (Joharsoyo, 2024). Dengan putusan itu, artinya PPP yang berdiri sejak 1973 ini pada akhirnya 'harus mundur' dari gelanggang pemilu. Untuk dapat kembali masuk menjadi peserta pada pemilu akan datang tentu bukan hal yang mudah. Karena politik nasional yang dinamis dan perubahan paket undang-undang politik tiap periode.

PPP bukan saja tidak senasib dengan PKS dan PKB yang lolos PT, tapi juga berbeda jauh dari dua partai warisan Orde Baru lainnya yakni PDIP dan Golkar. PDIP dan Golkar sejak dimulainya reformasi belum pernah keluar dari peringkat tiga besar hasil pemilu. Partai Beringin tersebut bahkan pernah sekali menjadi pemenang pemilu pada tahun 2004. Sedangkan PDIP berhasil mencatatkan *hattrick* dari Pemilu 1999, 2014, 2019, dan 2024 karena memenangkan empat pemilu sejak reformasi bergulir.

Dari dinamika politik Islam yang terjadi dalam konstelasi politik dalam negeri tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengapa PPP gagal dalam pemilu sementara PKS dan PKB berhasil bertahan. Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisisnya melalui pendekatan pelebagaan (institusionalisme) partai politik yang berlangsung di ketiga partai Islam tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat eksploratif untuk menganalisis dinamika partai Islam yang terjadi di sepanjang pemilu 2024. Metode kualitatif yang bersifat fleksibel memberi kemungkinan bagi peneliti untuk menyesuaikan pilihan pendekatan sesuai dengan objek penelitian yang dinamis (Patton, 2002). Makna dalam penelitian kualitatif menjadi sangat penting karena hal utama dari metode penelitian ini adalah analisis yang tidak hanya berfokus kepada hasil, melainkan juga melihat proses (Bogdan & Bikle, 1982). Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menjawab dinamika partai-partai Islam dalam Pemilu 2024.

Sumber penelitian ini sepenuhnya merupakan riset kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis data-data teks baik berupa buku, dokumen organisasi, media, maupun jurnal ilmiah. Penelitian ini dilakukan secara eksploratif dengan tujuan menemukan informasi mengenai sesuatu topik/masalah yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik (Pirmanto, 2016).

Penelitian ini cenderung desain studi kasus untuk memahami partai Islam yang mengikuti kontestasi Pemilu. Studi kasus diambil dalam penelitian ini adalah PKB, PKS, dan PPP. Penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus sering digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora untuk mengungkap perkembangan dinamika, proses, dan variabel kontekstual yang mempengaruhi objek penelitian. Selain itu, studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan mendeskripsikan fenomena komunikasi dalam konteks aslinya dengan mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi pola komunikasi tersebut (Yin, R. k., 2006).

Institusionalisme Partai Politik (*Political Party Institutionalism*)

Kualitas partai politik memiliki relasi kuat dengan proses institusionalisasi atau pelembagaan terhadap partai itu sendiri dan juga sistem politik dimana partai tersebut menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam konteks ini, upaya untuk meninjau proses pelembagaan institusi partai politik merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari langkah-langkah untuk memastikan demokrasi diisi partai politik berkualitas (Vicky Randall and Lars Svåsand, 2002). Samuel P Huntington menggarisbawahi hanya partai yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan terbangunnya demokrasi menjadi lebih baik (Samuel P. Huntington, 1968).

Peter Hall dan Rosemary Taylor menyebutkan ada tiga pendekatan baru dari teori institusionalisme atau pelebagaan institusi, yaitu institusionalisme kesejarahan (*historical institutionalism*), institusionalisme sosiologis (*sociological institutionalism*), dan institusionalisme pilihan rasional (*rational choice institutionalism*). Hall dan Taylor memberikan definisi institusi sebagai pengejawantahan dari prosedur formal dan informal, rutinitas, norma-norma, dan konvensi-konvensi yang terikat dalam struktur organisasi baik politik maupun ekonomi-politik (Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor, 1996). Institusi tersebut dapat berkisar dari aturan tatanan konstitusional atau standar operasional prosedur birokrasi hingga konvensi yang mengatur perilaku serikat pekerja atau hubungan bank-perusahaan (Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor, 1996). Secara umum, kalangan institusionalis historis mengaitkan institusi dengan organisasi dan aturan atau konvensi yang diumumkan organisasi formal. Rangkaian peristiwa dan berbagai hal yang terjadi di sepanjang perjalanan sebuah institusi merupakan bagian tidak terpisahkan dari institusi tersebut. Biasanya, dinamika yang terjadi menggambarkan unsur rutinitas, norma, dan konvensi baik kelompok maupun individual.

Rutinitas atau kegiatan harian yang berlangsung lama akan menciptakan sebuah rangkaian catatan bersejarah bagi jalannya organisasi dan akar kesejarahan institusi. Di dalamnya, sudah pasti terjadi dinamika antar individu baik dalam bentuk friksi atau lebih jauh lagi dalam bentuk konflik antar faksi. Bentuk-bentuk relasi ini yang justru menjadi hal penting karena setiap rutinitas keseharian tentunya memiliki kekhasan cerita yang berbeda dari waktu ke waktu.

Norma adalah peraturan atau ketentuan yang bersifat mengikat antar individu dalam suatu partai politik yang berfungsi sebagai pedoman, perintah, dan pengendalian perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua terikat dalam bentuk norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tersebut salah satunya muncul melalui konvensi yang menentukan sikap dan karakteristik unik partai. Selain itu, regulasi juga mengacu pada pedoman dan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan internal. Semuanya menyatu dalam pengertian institusionalisme historis, yaitu tentang bagaimana institusi dan organisasi menemukan bentuknya sendiri sesuai dengan dinamika perjalanan yang dijalaninya.

Randall dan Svasand membagi proses pelebagaan (*institutionalization*) yang merupakan hasil persilangan internal-eksternal dan struktural-kultural menjadi empat derajat indikator pelebagaan, yaitu kesisteman (*systemness*), identitas nilai (*value infusion*),

keputusan otonomi (*decisional autonomy*), dan pengetahuan atau citra publik (*reification*) (Randall & Svåsand, 2002; Ridha, 2017).

Derajat kesisteman merupakan proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik berdasarkan aturan dan ketentuan yang disepakati dalam AD/ART organisasi, termasuk di dalamnya manajemen konflik. Derajat identitas nilai berkaitan erat dengan nilai, norma, ataupun ideologi dan platform partai. Dalam hal ini, tentunya pergerakan dan arah perjuangan partai politik sangat ditentukan arah ideologi yang dianut partai tersebut. Hal itu juga dapat dilihat dari karakter sosial pendukungnya. Nilai di sini dapat bersumber dari agama, ajaran, ataupun ideologi filsafat tertentu.

Derajat otonomi keputusan menunjukkan independensi partai politik dalam menentukan arah dan pilihan politik dari intervensi pihak luar. Derajat ini lebih menekankan pada relasional pihak internal dengan eksternal, dalam hal ini yang paling sering mempengaruhi adalah kekuasaan atau pemerintah, ataupun pemilik modal seperti pengusaha. Partai yang ideal adalah partai politik yang semua keputusannya dibuat terbebas dari intervensi pihak luar. Dengan kata lain, pelembagaan sebuah partai politik semakin kuat jika proses pengambilan keputusannya benar-benar otonomi dan independen dari intervensi kekuasaan maupun pemilik modal. Tingkat kaderisasi dan pembagian kerja dalam organisasi juga mempengaruhi independensi pengambilan Keputusan.

Terakhir, derajat reifikasi atau pengetahuan publik tentang partai politik. Tingkat keterpilihan partai politik bergantung pada sejauh mana partai tersebut diketahui publik; bergantung pada sejauh mana popularitas partai tersebut di tengah-tengah publik, termasuk citra partai dalam pengetahuan tersebut. Pertanyaan besarnya adalah apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik atau tidak. Apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai, publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan partai politik tersebut (Rachmayani & Warganegara, 2023). Dalam konteks ini, pelibatan lembaga survei untuk mengukur tingkat popularitas dan elektabilitas partai sangat diperlukan.

Sementara itu, *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (IMD) memiliki versi lain mengenai lima indikator pelembagaan partai, yaitu keadaan demokrasi internal, keutuhan internal, identitas politik (ideologi), ketangguhan organisasi, dan kapasitas berkampanye (Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD), 2006).

Penelitian ini lebih mengombinasikan pendekatan pelebagaan baik yang dikemukakan Peter Hall dan Rosemary Taylor tentang institusionalisme kesejarahan (*historical institutionalism*), Randall dan Svasand tentang derajat institusionalisme, maupun dari *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (IMD). Ketiga pendekatan teori tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana fungsi partai politik dan proses pelebagaan terjadi pada PPP, PKB dan PKS secara umum. Sehingga teori tersebut dapat membantu dalam memahami jawaban dari pertanyaan mengapa elektoral PPP terus menurun hingga akhirnya gagal lolos ketentuan *parliamentary threshold* pada pemilu 2024 namun sebaliknya pada PKB dan PKS.

HASIL PENELITIAN

Partai-partai di Indonesia tidak ada yang tidak pernah mengalami turbulensi dalam perjalanannya di dalam sistem politik nasional, baik turbulensi tersebut terkait perkara hukum pidana seperti korupsi, maupun berkaitan dengan permasalahan politik seperti perpecahan akibat dualisme kepemimpinan. Namun dari beragam bentuk turbulensi tersebut, ada partai yang justru mampu mengkapitalisasinya menjadi peluang konsolidasi internal sehingga mampu bertahan dan berkembang. Tapi ada juga partai yang gagal menjadikan problem tersebut sebagai peluang sehingga makin terpuruk dan akhirnya bubar. Begitu pun dengan partai-partai Islam yang juga tidak lepas dari turbulensi politik.

Kekuatan dan kelemahan partai politik dalam menghadapi tantangan dan ujian politik menggambarkan kondisi kelembagaan partai itu sendiri. Unsur-unsur yang mempengaruhi pelebagaan partai dapat berupa struktur dan komposisi organisasi, kepemimpinan, kaderisasi, budaya politik, hingga kekuatan jaringan dan finansial.

Dinamika Partai Islam

Partai Islam adalah partai politik yang berasaskan Islam dan menjadikan ajaran agama Islam sebagai panduan utama dalam visi, misi, program, dan kebijakan politiknya. Partai ini biasanya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Partai Islam biasanya memiliki ciri utama seperti asas ideologi Islam, basis kader tradisional, dan agenda keumatan sebagai agenda politik utama (Ratnawati & Haris, 2008; Tomsa, 2019).

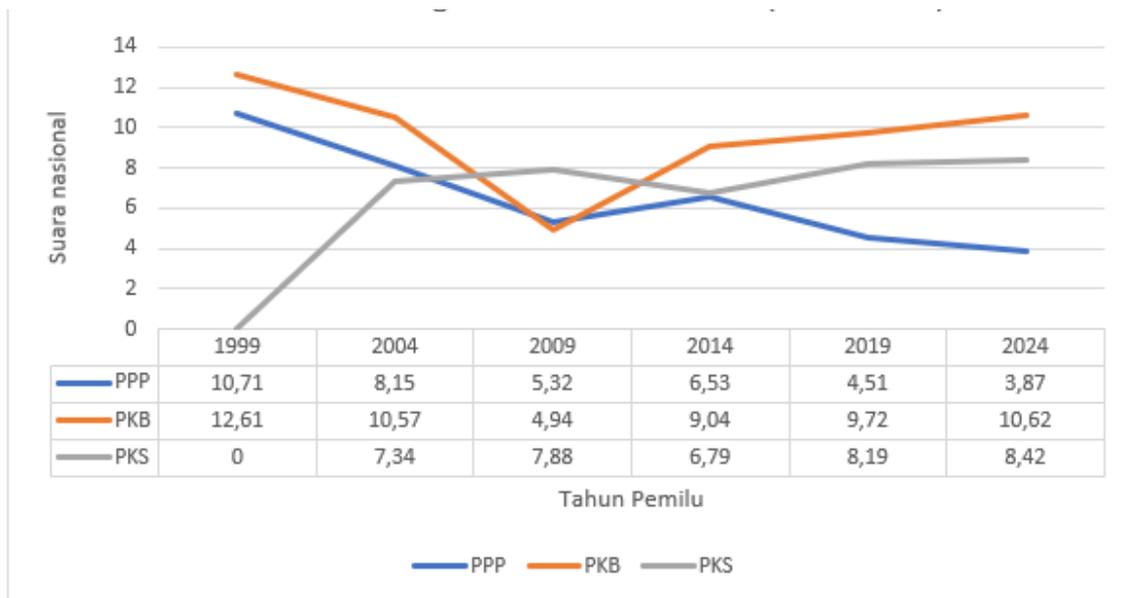
Sebelum mengulas satu persatu partai Islam yakni PKB, PKS, dan PPP, gambaran umum kondisi kelembagaan ketiganya dapat dilihat melalui perolehan suara nasional masing-masing sebagai berikut.

Tabel 1. Suara Nasional PPP, PKB, dan PKS dari Pemilu 1999 sampai 2024

Partai Islam	1999	2004	2009	2014	2019	2024	Rata-rata
PPP	10.71	8.15	5.32	6.53	4.51	3.87	6.52
PKB	12.61	10.57	4.94	9.04	9.72	10.62	9.58
PK/PKS	1.36	7.34	7.88	6.79	8.19	8.42	6.44
TOTAL	24.68	26.06	18.14	22.36	22.42	22.91	22.54

(Data diolah dari berbagai sumber)

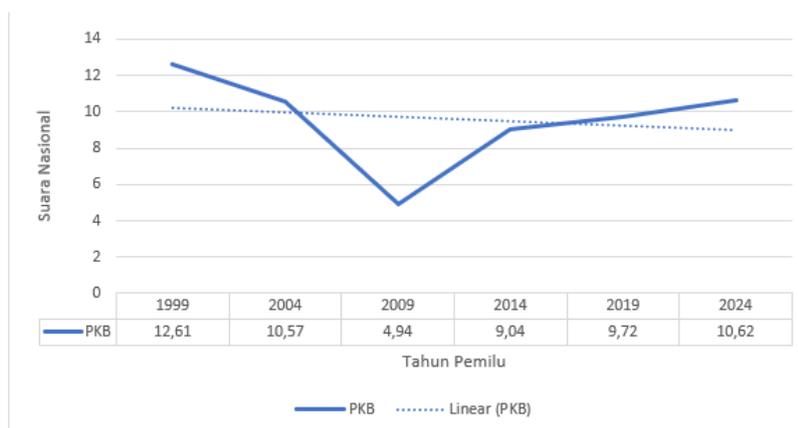
Tabel 2. Perbandingan Suara Partai Islam (1999-2024)



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Secara umum, pelebagaan di PKB lebih baik daripada PPP sehingga mampu bertahan di panggung politik nasional. Hal itu dapat dilihat dari garis kecenderungan (*trendline*) suara nasional yang diperoleh PKB dari pemilu ke pemilu.

Tabel 3. Suara Nasional PKB (1999 sd 2024)



Berdasarkan grafik tersebut di atas, dapat dilihat PKB sempat turbulensi pada pemilu 2009. Namun berhasil bangkit kembali pada pemilu berikutnya dan stabil bertahan hingga 2024. Hal itu menunjukkan ada upaya pelebagaan sangat baik di internal PKB untuk mengelola konflik menjadi peluang dan potensi kemenangan. Apalagi upaya pengelolaan itu juga didukung oleh melimpahnya lumbung suara PKB yang berasal dari organisasi kultural Nahdlatul Ulama (NU).

PKB lahir sebagai hasil ijtihad sejumlah ulama NU setelah jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. PKB meraih suara signifikan lebih dari 12 % pada pemilu pertama yang diikutinya pasca Orde Baru tahun 1999. Hasil ini menjadikan PKB mendapatkan posisi tawar kuat untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon presiden yang akhirnya terpilih di MPR tahun 1999. Dalam perjalanan selanjutnya, langkah politik PKB untuk menjadi partai diperhitungkan menghadapi halang rintang yang tidak kecil, terutama terkait dengan konflik dan faksionalisasi internal. Sejak pendiriannya tersebut, PKB menghadapi turbulensi internal yang cukup kritis dan berdampak terhadap elektoral dan popularitas. Tiga konflik internal harus dihadapi PKB. Konflik pertama antara Gus Dur dan Matori Abdul Jalil terjadi tahun 2001. Pada tahun 2004, konflik kembali terjadi antara Gus Dur dan Alwi Shihab. Sedangkan perselisihan internal yang paling krusial terhadap elektoral PKB adalah sengketa antara Gus

Dur dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) jelang Pemilu 2009. Akibatnya, suara PKB anjlok drastis menjadi 4,94% dibandingkan pemilu 2004 yang mendapat elektoral 10,57%.

Namun demikian, hasil dari konflik terakhir ini juga menunjukkan eksistensi kubu Gus Dur yang tergusur oleh kubu Cak Imin. PKB selanjutnya berjalan di bawah pimpinan Cak Imin dan bisa bertahan hingga pemilu 2024. PKB berhasil menjadikan konflik sebagai peluang untuk bangkit kembali dengan merapikan Kembali keorganisasian partai dan proses pelembagaan partai dalam rangka merealisasikan tingkat kohesivitas partai yang solid agar terhindar dari fragmentasi berulang (Ekawati, 2016).

Dari tiga aspek institusionalisasi yaitu ideologi, perkembangan keanggotaan atau kaderisasi, dan kohesivitas dalam partai digunakan untuk membaca pelembagaan PKB. Kohesivitas atau soliditas atau koherensi merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan internal. Soliditas partai berkaitan dengan kapasitas organisasi tersebut untuk mengintegrasikan serta mempertahankan seluruh sub-sistem internal yang memastikan semua bagian dari organisasi dapat bekerja bersama demi tujuan yang sama (Firman Noor, 2015). Kepemimpinan Cak Imin mampu merekatkan soliditas internal PKB, meskipun PKB tidak menerima keseluruhan suara nahdhiyin yang terdiaspora ke partai-partai lain. Karena preferensi pilihan politik warga nahdhiyin selain faktor ideologi, juga dipengaruhi pilihan politik Kyai atau pimpinan pesantren sebagai tokoh karismatik. Kembang-kempis hubungan PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga kerap kali menentukan perjalanan elektoral PKB.

Pada aspek ideologi, sejak pembentukannya tahun 1999, tiga kali konflik yang melanda PKB mampu dikelola dengan baik salah satunya karena ada faktor perekat ideologi yang berbasiskan pada nilai dan tradisi Nahdlatul Ulama (NU). Gejolak relasi internal mampu diredam oleh daya rekat ideologi tersebut. Bahkan tidak hanya mampu sebagai perekat, tapi konsistensi memegang ideologinya menghasilkan perolehan suara PKB yang cukup signifikan pada Pemilu 2014. Dukungan Kyai-Kyai NU karismatik semakin memperkuat fondasi ideologi dan tradisi di PKB. Sehingga pasca konflik terakhir itu juga, PKB mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang internal untuk memperbaiki fungsi partai dalam rekrutmen dan manajemen konflik. PKB juga berhasil membuktikan kemampuan beradaptasi dengan sistem politik bahkan menjadikannya sebagai motivasi soliditas internal partai.

Meskipun menyatakan sebagai partai inklusif, PKB tidak bisa menutupi diri sebagai partai Islam karena lahir dari organisasi dakwah besar NU. Oleh karena itu, sudah tentu

sebagian besar anggota PKB merupakan warga nahdliyin. PKB relatif tidak mengalami kesulitan rekrutmen anggota karena memiliki hubungan kultural dengan PBNU sebagai induk organisasi yang mewadahi warga dan sayap organisasi nahdhiyin mulai dari Fatayat NU, Muslimat NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Angkatan Muda NU, Pemuda Anshor Garda Bangsa, dan organisasi sayap perempuan PKB (PPKB) (Ekawati, 2016; Kadomi, 2022). Meskipun warga nahdliyin yang diperkirakan berjumlah 40 juta tersebut terdiaspora secara pilihan politik, PKB tetap diuntungkan sebagai satu-satunya partai Islam yang paling representatif mewadahi aspirasi warga nahdliyin. Kader-kader potensial dari kantong NU yang nantinya mengisi jabatan-jabatan struktural partai maupun menjadi calon anggota legislatif (PKB, 2024).

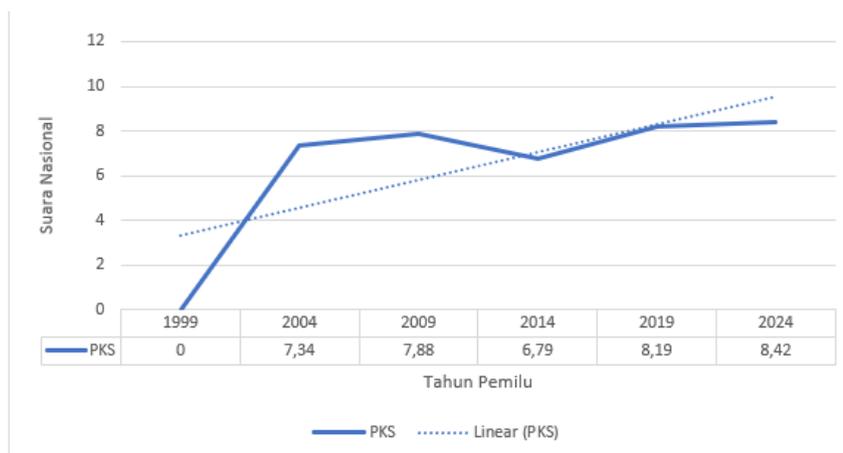
Selain warga nahdhiyin, PKB juga membuka diri keanggotaan yang beragam latar belakang meskipun jati diri NU tetap mendominasi. Berdasarkan basis ideologinya, PKB memberikan kesempatan bagi yang berasal dari agama lain untuk bisa bergabung baik ditempatkan di jajaran kepengurusan partai maupun didorong menjadi *vote getter* melalui pencalonan legislatif.

Pada aspek kohesivitas, konflik ketiga dimana Gus Dur harus menghadapi keponakannya sendiri menjadi momentum yang paling menentukan arah balik PKB. Gus Dur kalah cepat dalam mendaftarkan PKB versinya ke Kemenkumham dibandingkan manuver Cak Imin untuk diverifikasi. Jika pada dua konflik pertama Gus Dur memenangkan sengketa, tapi untuk konflik ketiga ini Gus Dur kalah tanggap oleh Cak Imin. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung RI memenangkan Cak Imin dalam perseteruannya dengan Gus Dur dan menyatakan kepengurusan PKB versi Cak Imin sebagai kepengurusan yang sah. Cak Imin pun dinyatakan sebagai ketua umum PKB yang sah. Konsekuensinya, PKB Cak Imin yang berhak mengikuti Pemilu 2009. Kemenangan sengketa ini sangat menentukan proses pelembagaan PKB pada tahap selanjutnya. Sebab turbulensi elektoral yang dialami PKB cukup drastis pada pemilu 2009, tapi partai hijau tersebut mampu mentransformasikan pengalaman turbulensinya menjadi kebangkitan di pemilu 2014.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sebagaimana PKB, PKS juga memiliki kondisi kelembagaan yang relatif kuat dan baik. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari perjalanan elektoral partai tarbiyah tersebut sejak awal reformasi hingga pemilu 2024.

Tabel 4. Suara Nasional PKS (1999-2024)



(Data diolah secara manual dari berbagai sumber)

PKS belum terlibat dalam kontestasi pemilu 1999. Partai yang awalnya berbasiskan pada gerakan dakwah kampus ini awalnya didirikan dengan nama Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998. Pada Pemilu 1999, PK berpartisipasi untuk pertama kalinya, tetapi hanya meraih 1,4 % suara setara dengan 7 kursi di DPR RI. Dengan hasil ini, PK membangun satu fraksi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Hasil tersebut mendorong PK untuk bertransformasi menjadi PKS pada tahun 2002 agar dapat mengikuti pemilu berikut tahun 2004. Strategi perubahan nama dan lambang tersebut membuahkan hasil signifikan. PKS berhasil menunjukkan performa yang lebih kuat pada Pemilu 2004 dengan *tagline* kampanye Bersih dan Peduli, PKS menarik banyak pemilih muda dan kelas menengah. Pada pemilu tersebut, PKS mendapatkan 7,34 % suara nasional dan memperoleh 45 kursi di DPR, menjadikannya salah satu partai Islam terbesar saat itu. Pemilu 2009, PKS mengampanyekan *tagline* Bersih, Peduli, dan Profesional yang memberi penegasan terhadap semangat anti-korupsi, profesionalisme birokrasi, dan kepedulian. Sementara pada pemilu 2014, setahun setelah tragedi presidennya Luthfi Hasan Ishaq yang terjerat korupsi, PKS mengubah pendekatan politiknya dengan *tagline* kampanye Cinta, Kerja, dan Harmoni. Sejak pemilu 2004, PKS dapat dikatakan satu-satunya partai Islam yang mampu mempertahankan basis elektoral secara seimbang dan stabil meskipun tidak lepas dari sejumlah turbulensi internal.

PKS memiliki aspek ideologi yang bersifat integral dengan dua aspek lainnya yaitu kaderisasi dan kepemimpinan. Aspek-aspek ini yang mendukung kepada kohesivitas partai menjadi kuat. Integralitas aspek ideologi dengan aspek kaderisasi dan kepemimpinan ini sebenarnya menjadi modal utama khususnya bagi partai Islam dalam membangun

pelembagaan organisasi yang solid dan kuat. Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Sehingga ketika terjadi konflik, PKS memiliki mekanisme manajemen konflik yang relatif sangat baik melalui Majelis Syuro dan Dewan Syariah (Mahkamah Partai).

PKS relatif tidak mengalami konflik yang berujung pada faksionalisasi signifikan sebagaimana menerpa PKB. Satu-satunya konflik internal PKS yang berujung pada faksionalisasi hingga perpecahan adalah konflik antara faksi status-quo PKS (seperti Luthfi Hasan Ishaq, Hidayat Nur Wahid, dan Sohibul Iman) dengan faksi Anis Matta yang seringkali dilihat sebagai konflik kubu keadilan versus kubu kesejahteraan. Konflik laten kedua faksi muncul pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 lalu memuncak dan mengkristal pada 2018. Artinya, sepanjang 11 tahun atau dua kali pemilu tersebut, PKS mampu mengelola turbulensi internalnya sehingga tidak berujung pada perpecahan yang dapat menyuramkan organisasi. Meskipun pada akhirnya menjelang pemilu 2019, faksi kesejahteraan Anis Matta harus terhempas keluar dari PKS dan membentuk partai baru bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Kekokohan organisasi, soliditas internal, dan manajemen konflik yang sangat baik ditunjukkan PKS dengan pembuktian perolehan elektoral mereka yang justru meningkat pada pemilu 2019, dan stabil di 2024.

Adapun konflik-konflik yang melanda partai tarbiah ini sebelumnya lebih bersifat personal, yakni antara salah satu tokoh partai dengan pimpinan partai, seperti dalam kasus konflik pendiri PKS Yusuf Supendi dengan pimpinan PKS jelang Pemilu 2009, dan kasus Fahri Hamzah melawan pimpinan PKS pasca Pemilu 2014 (Wahyuni & Ayu, 2022). Turbulensi lain yang dihadapi PKS adalah kasus korupsi impor sapi yang menjerat presidennya yakni Luthfi Hasan Ishaq tahun 2013.

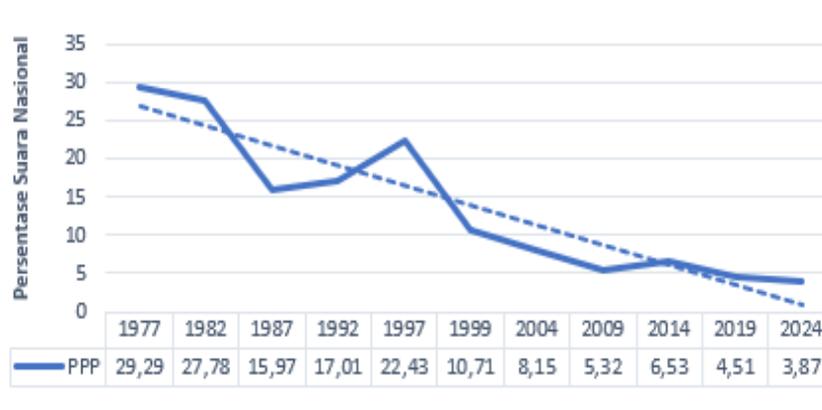
Seperti PKB, PKS memiliki keunggulan pada ideologi yang bersifat integral dengan kaderisasi sehingga hal ini menjadi faktor kohesivitas yang kuat diantara anggota serta ketaatan para kadernya kepada pimpinan partai. Manajemen konflik yang dibangun dengan rapi dan sistematis membuat setiap perbedaan yang terjadi di tubuh PKS tidak dengan cepat berkembang menjadi konflik terbuka ke publik.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Berbeda dengan PKB dan PKS, jika melihat grafik elektoral, garis kecenderungan (*trendline*) elektoral PPP justru menyusut. Terutama setelah unsur Islam tradisonalis yakni NU keluar dari partai berlambang kabah tersebut dan membentuk wadah nahdliyin baru

bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tidak saja PKB, kelompok kecil modernis di PPP juga turut tergerus sebagai akibat berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) yang ketika itu merepresentasikan konstituen Muhammadiyah dan Partai Keadilan (PK) yang menjadi wadah kaum Islam perkotaan. Diakui, sepanjang Orde Baru unsur Parmusi, PSII, dan Perti tidak memiliki organisasi kultural dan mengalami proses kaderisasi yang matang sehingga mampu menyuplai kebutuhan sumber daya manusia bagi pelembagaan PPP. Hal ini berbeda dengan unsur NU yang memiliki basis massa besar dan melimpah. Bahkan tren penurunan itu sudah terjadi sejak era Orde Baru, dimana tidak ada partai Islam lain, seperti tergambar pada grafik di bawah.

Tabel 5. Suara Nasional PPP (1977-2024)



(Data diolah secara manual dari berbagai sumber)

Sebelumnya, sudah banyak yang memprediksi kemunduran partai ini. Hal tersebut tidak lain karena grafik capaian politik PPP yang terus mengalami degradasi sejak pasca Orde Baru dan konflik internal yang melanda partai tersebut (Moch Nurhasim, 2016). Meskipun mayoritas warga negara berpenduduk lebih dari 270 juta jiwa ini merupakan Muslim, partai Islam belum pernah memenangi pemilu. Mayoritas suara umat Islam lebih banyak disalurkan kepada partai yang berasaskan nasionalis. Pada pemilu pertama tahun 1955, gabungan suara Partai Masyumi dan Partai NU mencapai 43,73%. Perolehan ini menjadi prestasi elektoral politik Islam terbesar di sejarah demokrasi Indonesia (Nurhasim, 2016). Tapi secara parsial, suara partai Islam tetap kalah dari partai nasionalis.

Pada pemilu berikutnya tahun 1971 di masa Orde Baru, 10 partai berkompetisi termasuk empat partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama (PNU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia

(Parmusi). Akan tetapi, perolehan suara keempat partai Islam itu hanya 27,12% lebih rendah dari perolehan pada pemilu sebelumnya.

Tahun 1973, pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan politik dengan menggabungkan partai-partai berideologi Islam dan nasionalis (termasuk non-Islam). Empat partai Islam disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan beberapa partai nasionalis dan Kristen disatukan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, dan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Pemerintah Orde Baru kemudian membentuk entitas golongan di luar kedua partai tersebut yang disebut Golongan Karya (Golkar) (Efriza, 2017). Penyederhanaan politik Islam ini sebagai strategi Orde Baru untuk mendegradasi pengaruh islamisme. Sebab dengan penfusian politik Islam, terjadi kompromi antara idealisme dan tujuan gerakan di antara partai-partai Islam, serta kompromi dengan demokrasi.

Sistem pemilu tidak langsung dan tertutup yang diterapkan Orde Baru, di satu sisi memberi ruang bagi PPP sebagai satu-satunya politik Islam di dalam demokrasi. Tapi di sisi lain, menempatkan politik Islam dalam posisi ter subordinasi. Sehingga Orde Baru secara penuh mengontrol tidak hanya sistem politik, tapi juga politik Islam. Pengendalian itu dilakukan Orde Baru salah satunya melalui pemberlakuan kewajiban Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi dalam organisasi apa pun, atau dikenal dengan kebijakan Asas Tunggal. Orde Baru juga mengubah simbol kabah pada PPP menjadi bintang di tahun 1985. Hal ini dalam rangka menekan citra politik Islam. Karena hal itu, ruang gerak politik Islam menjadi sangat terbatas. Idealisme politik Islam diarahkan untuk memberi warna pemerintahan yang dijalankan dengan sistem demokrasi Pancasila.

Kontrol Orde Baru terhadap politik Islam terlihat dari perolehan PPP dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 1977, suara PPP mencapai 29,29 %. Pada pemilu berikutnya tahun 1982, suara PPP turun menjadi 27,78 %, dan turun drastis di tahun 1987 menjadi 15,96 %. Pada Pemilu 1997 suara PPP sempat kembali melonjak menjadi 22,43 % sebagai akibat gejolak politik ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap rezim Orde Baru. Lonjakan elektoral tersebut juga disebabkan adanya kesepakatan PDI pimpinan Megawati dengan PPP dalam kampanye besar yang dikenal sebagai Mega-Bintang pasca peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996. Sehingga terjadi limpahan suara dari pendukung PDI versi

Megawati kepada PPP. Tapi pada Pemilu yang digelar dua tahun kemudian (setahun setelah Presiden Soeharto mundur), PPP hanya meraih 10,72 % suara nasional. Dengan capaian ini, PPP hanya menempatkan 58 wakilnya di DPR RI (Kusnandar, 2022; Liddle, 1999).

Pada pemilu berikut, berturut-turut suara PPP terus menurun. Tahun 2004, PPP hanya meraih suara nasional 8,12 %. Tahun 2009 suara yang diperoleh PPP semakin turun menjadi 5,33 %, dan tahun 2014 sedikit naik menjadi 6,53 %. Akan tetapi tahun 2019 kembali anjlok menjadi 4,53 % (Kusnandar, 2022).

Krisis kepemimpinan dan organisasi di partai politik salah satu sebabnya adalah konflik internal. Konflik internal dapat menyebabkan krisis dalam organisasi. Begitu pun sebaliknya, krisis keorganisasian dapat menyebabkan konflik politik. Giovanni Sartori menegaskan bahwa rivalitas dan konflik internal parpol terbentuk karena adanya faksi-faksi di dalamnya (Giovanni Sartori, 1976). Rivalitas faksi-faksi tersebut umumnya dipicu oleh perebutan pengaruh dan kekuasaan (Hofmeister dan Grabow, 2011). Adanya sumber-sumber daya yang diperebutkan, juga menjadi sumber konflik dalam politik (Surbakti, 1992). Konflik dalam suatu organisasi dapat berdampak ke dua arah, yaitu destruktif atau konstruktif.

Dalam kasus PPP, dua konflik internal PPP pada dekade kedua pascareformasi menjadi bagian sejarah yang paling menentukan bagi nasib partai Ka'bah tersebut di fase-fase berikutnya. Pertama, konflik internal menjelang Pemilu 2009. Kedua, dualisme kepemimpinan pada periode 2015-2017. Sengketa kepemimpinan ini menjadi konflik terparah dalam sejarah PPP karena dampaknya terhadap mentalitas dan kinerja kader di parlemen baik pusat maupun daerah, serta konsolidasi internal partai tersebut jelang Pilkada serentak 2015 dan 2017 (Amin Nurdin dkk, 2019). Saat PPP di bawah kepemimpinan Hamzah Haz (1998-2003 dan 2003-2007) sengketa internal terjadi. Pimpinan PPP lainnya, KH Zainuddin MZ yang kecewa bersama dengan sejumlah tokoh lainnya kemudian mendirikan partai politik tandingan yang dinamai PPP Reformasi. Kemudian hari, partai tersebut berubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) (Moch Nurhasim, 2016).

Konflik lain terjadi antara Bachtiar Chamsyah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) dengan Suryadharma Ali sebagai Ketua DPP PPP dalam dukung-mendukung pasangan calon presiden jelang Pemilu 2009. Bachtiar melakukan manuver politik dengan menggagas koalisi pencapresan bersama empat parpol lain, Partai Demokrat, dan Golkar

untuk mendukung pencapresan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Sementara pada saat yang sama, Suryadharma juga bermanuver dengan melakukan safari politik dalam rangka menjajaki kandidat lain melalui program 'PPP Mendengar' (Amin Nurdin dkk, 2019). Ironisnya, konflik internal yang dialami PPP bukan saja persaingan faksional yang berbeda kepentingan, tapi juga sandungan kasus korupsi yang dialami pimpinannya. Surydharma Ali yang pernah menjadi Ketum PPP tahun 2010-2014, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat dirinya sedang menjabat Menteri Agama pada tahun 2014, tak lama jelang Pemilu. Lima tahun kemudian, giliran Ketum Romahurmuziy ditangkap KPK dalam kasus korupsi yang juga di lingkungan Kementerian Agama tahun 2019 (Dewi Nurito, 2019; Dylan Aprialdo Rachman, 2019). Terpaan silih berganti yang dialami PPP memicu penurunan elektoral partai tersebut dalam pemilu. Nampaknya, konflik yang terjadi di tubuh PPP justru berdampak destruktif terhadap partai itu sendiri.

Konflik faksional di tubuh PPP membuat daya tahan keorganisasian partai Islam tersebut makin rapuh. Sebagai partai Islam tertua yang merupakan gabungan empat partai Islam sebelumnya, PPP tidak hening dari sengketa internal akibat perbedaan latar belakang kader yang beragam karena berasal dari empat partai Islam yang berbeda tersebut (Amin Nurdin dkk, 2019). Apalagi jika menilik sejarah, PPP pada dasarnya merupakan partai penggabungan dan mengalami pembelahan secara natural di awal reformasi di mana salah satu unsur terbesarnya yakni Partai Nadlatul Ulama (PNU) memisahkan diri, yang kemudian terbentuk PKB tahun 1999.

Selain itu, kenyataan yang dialami PPP menunjukkan lemahnya ideologi sebagai faktor perekat atau kohesivitas. Umumnya, ideologi politik menjadi unsur dominan dan utama bagi gerakan politik Islam. Namun hal tersebut sepertinya tidak terjadi pada PPP. Hal itu dapat dipahami jika menelusuri pelembagaan historis (*historical institutionalism*) partai hijau tersebut. Kohesivitas ideologi yang kuat di tubuh PPP hanyalah pada basis NU. Sementara tiga unsur lainnya, yakni Parmusi, PSII, dan Perti tidak memiliki basis ideologi dan kaderisasi yang jelas dalam membentuk identitas PPP. Sehingga ketika unsur NU keluar dari partai, PPP mengalami kepincangan sangat signifikan. Pada saat yang sama, PKB mengalami penguatan elektoral meskipun tidak seluruh warga nahdliyin melabuhkan suaranya ke PKB.

Kelemahan pada aspek ideologi dan kohesivitas ini, berimbas kepada lemahnya juga daya tarik komunikasi politik PPP ke publik. Kesenambungan vertikal partai politik dalam pemilu dapat terjadi apabila partai-partai dapat menciptakan sebuah rantai komunikasi sangat baik dengan anggota dan warga. Stabilitas organisasi partai politik akan memelihara preferensi pemilihan dari para pemilih. Alasannya sederhana, partai yang memiliki stabilitas dan soliditas pelembagaan secara baik akan mampu bertahan pada arena politik yang dinamis, serta mereka dapat memperkenalkan perspektif preferensinya kepada konstituen melalui pengenalan program organisasi dan kandidat-kandidat yang disiapkan dalam jangka panjang (Nurhasim, 2016).

SIMPULAN

Salah satu hasil mengejutkan dalam Pemilu 2024 adalah tidak lolosnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke parlemen nasional. Sementara dua partai Islam lainnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhasil bertahan dan lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Indikasi keberhasilan dan kegagalan ketiga partai Islam tersebut terlihat berdasarkan perkembangan elektoral dari pemilu ke pemilu, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan institusionalisme atau pelembagaan.

Dalam pendekatan tersebut, ada sejumlah faktor utama yang mempengaruhi kuat atau lemahnya sebuah lembaga atau organisasi, yakni faktor ideologi internal, faktor keanggotaan atau kaderisasi, faktor kepemimpinan, faktor struktur keorganisasian, hingga faktor kohesivitas internal. Berdasarkan analisis, PKB dan PKS relatif memiliki unsur pelembagaan yang lebih baik daripada PPP sehingga mampu bertahan. PPP memiliki faktor ideologi, kaderisasi, hingga kepemimpinan yang lemah sehingga tidak mampu mengelola turbulensi internal secara baik. Kelemahan unsur-unsur pelembagaan di tubuh PPP terefleksikan dalam perjalanan elektoral yang selalu turun dari pemilu ke pemilu. Sedangkan PKB dan PKS didukung ideologi, kaderisasi, dan kepemimpinan yang baik sehingga menjadi kohesivitas internal yang mampu membawa partai mempertahankan elektoral dan lolos ke parlemen nasional.

PENGAKUAN

Penelitian ini mendapatkan dukungan bantuan pendanaan dari Lembaga Penelitian, Inovasi, dan Pengabdian Masyarakat (LPIPM) Universitas Al-azhar Indonesia melalui skema pembiayaan internal Competitive Research Grant (CRG) periode tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, R. C., & Bikle, S. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon.
- Efendi, A. (2023). Menciptakan pemilih pemula cerdas dalam pemilu serentak 2024 menuju indonesia berkemajuan. *Jurnal Bakti Sosial*.
<https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/baktisosial/article/view/75>
- Efriza, Y. R. (2017). *Sistem Politik Indonesia; Menjelajah Teori dan Praktik*. Intrans Publishing.
- Ekawati, E. (2016). Institutionalisation of the National Awakening Party (PKB) After the General Election 2009. *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 2(1), 46–61.
<https://doi.org/10.52447/polinter.v2i1.500>
- Hall, Peter A. & Taylor, Rosemary C. R. (1996). *Political Science and the Three New Institutionalisms* (Issue June).
- Hofmeister, W. & Grabow, K. (2011). *Political Parties Functions and Organisation in Democratic Societies*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Joharsoyo, Y. M. (2024). *Peluang PPP Lolos ke Senayan Menipis setelah MK Tak Terima Gugatan di 19 Provinsi*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1871094/peluang-ppp-lolos-ke-senayan-menipis-setelah-mk-tak-terima-gugatan-di-19-provinsi>
- Kadomi, M. F. (2022). Kyai dan Politik: Peranan KH Mahfudz Ridwan dalam Partai Kebangkitan Bangsa 1998-2008: Ulema and Politics: The Role of KH Mahfudz Ridwan in the National *Journal of Islamic History*.
<https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jih/article/view/117>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Perolehan Suara PPP Cenderung Menurun sejak Pemilu 1999*. Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/22/perolehan-suara-ppp-cenderung-menurun-sejak-pemilu-1999>
- Liddle, R. W. (1999). The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation. *Religion, Globalization and Political Culture in the* https://doi.org/10.1007/978-1-349-27038-5_6
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD). (2006). *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis*.

- Nurhasim, M. (2016). Stagnasi Elektoral Partai Persatuan Pembangunan (PPP). In Moch Nurhasim (Ed.), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. LIPI.
- Nurdin, M. A., Saputra, A. T. D., & Prayitno, A. (2019). *Prahara partai Islam: komparasi konflik internal PPP dan PKS*. books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=IIKWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=partai+islam&ots=a5jOPqUUEN&sig=zfrRb-iAlce1kxEY_klhvTT360
- Nurhasim, M. (2016). Masa Depan Partai Islam Era Reformasi: Sebuah Perspektif Analisis. In *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. LIPI & Pustaka Pelajar.
- Nurito, D. (2019). *OTT Romahurmuziy Menambah Daftar Ketum Parpol Ditangkap KPK*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1185805/ott-romahurmuziy-menambah-daftar-ketum-parpol-ditangkap-kpk>
- Noor, F. (2015). Perpecahan & solidaritas partai Islam di Indonesia: kasus PKB dan PKS di dekade awal reformasi. In *LIPI*. LIPI Press.
- PKB. (2024). *Sejarah Pendirian PKB*. Partai Kebangkitan Bangsa. <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publication.
- Pirmanto, D. (2016). *Jenis Penelitian Menurut Kedalaman analisis data* (Vol. 77, Issue 21). <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- Rachman, D. A. (2019). *KPK Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka*. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2019/03/16/12195371/kpk-tetapkan-ketum-ppp-romahurmuziy-tersangka#google_vignette
- Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 389–398. <https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2761>
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *SAGE Publication*, 8(1), 5–29.
- Ratnawati, T., & Haris, S. (2008). *Political Parties in Indonesia from the 1950s to 2004: An Overview*. assets.publishing.service.gov.uk.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08bc0e5274a31e000d4e/wp61.pdf>
- Ridha, M. (2017). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) Di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan. *CosmoGov*, 2(1), 160.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>
- Sartori, G. (1976). *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. Cambridge University

Press.

Sijaya, A. (2021). *Menyongsong pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di Indonesia*.

books.google.com.

<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dSddEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=%22politik+islam+indonesia%22+%22partai+indonesia%22&ots=0fn2K92zGu&sig=8KjWee0Wgr55TF3kU7vMBKUmbQg>

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo.

Tomsa, D. (2019). *Islamism and Party Politics in Indonesia*. Oxford University Press.

<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1157>

Wahyuni, H., & Ayu, R. F. (2022). Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(1), 79–92.

<https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i1.2195>

Wibawana, W. A. (2024). *Data Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri*. Detik.Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7150264/data-jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-seluruh-indonesia-dan-luar-negeri>

Yuniarto, T. (2024). *Pemilihan Umum 2024 dalam Angka*. Kompaspedia.

<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilihan-umum-2024-dalam-angka>

Yin, R. k. (2006). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada.